



## Analisis Kebijakan Pemutusan Hubungan Diplomatik Oleh Aljazair Terhadap Maroko Tahun 2021

Michael Ahmad Zulha<sup>1</sup>, Made Panji Teguh Santoso<sup>2</sup>, Nurbani Adine Gustianti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 05 September 2025  
Revised: 17 September 2025  
Accepted: 28 September 2025

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Aljazair terhadap Maroko pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam memahami dinamika politik luar negeri kedua negara. Dalam penelitian ini, konflik berkepanjangan mengenai wilayah Sahara Barat menjadi pusat ketegangan antara Aljazair dan Maroko, dimana kedua negara memiliki kepentingan nasional yang saling bertentangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Aljazair untuk memutus hubungan diplomatik tidak dapat dilepaskan dari faktor historis, geopolitik, serta berbagai insiden yang memperburuk kepercayaan antara kedua pihak, seperti tuduhan spionase dan pernyataan politis yang provokatif. Pemutusan hubungan ini menyiratkan kegagalan diplomasi bilateral dan meningkatnya rivalitas regional.*

**Keywords:** *Aljazair, Maroko, pemutusan hubungan diplomatik, realisme, kepentingan nasional, Sahara Barat.*

(\*) Corresponding Author: [michaelahmad368@gmail.com](mailto:michaelahmad368@gmail.com)

**How to Cite:** Zulha, M., Santoso, M., & Gustianti, N. (2025). Analisis Kebijakan Pemutusan Hubungan Diplomatik Oleh Aljazair Terhadap Maroko Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.D), 25-35. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11789>.

---

## PENDAHULUAN

Pada mula terbentuk negara-bangsa modern, kemampuan untuk menjalankan hubungan diplomatik dianggap sebagai salah satu atribut dasar dari kedaulatan negara. Hubungan diplomatik adalah bentuk resmi dari interaksi antarnegara yang telah disepakati bersama, yang mencakup pembentukan misi diplomatik, pertukaran duta besar, dan berbagai bentuk kerja sama antarnegara sesuai dengan Konvensi Wina 1961 (Cornago, 2008). Hubungan diplomatik antarnegara merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat global maupun regional. Dalam sistem politik internasional, negara-negara membangun hubungan diplomatik untuk memperkuat kerja sama dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, pertahanan, dan budaya. Tetapi, sejarah juga mencatat bahwa hubungan diplomatik tidak selalu berjalan harmonis. Berbagai faktor seperti konflik kepentingan, perbedaan ideologi, dan persaingan geopolitik sering kali menjadi pemicu ketegangan, bahkan dapat berujung pada pemutusan hubungan diplomatik.

Di kawasan Afrika Utara, hubungan antarnegara sering kali dipengaruhi oleh faktor sejarah, kepentingan, dan persaingan regional. Hubungan bilateral yang mengalami dinamika rumit adalah antara Maroko dan Aljazair. Kedua negara ini berbagi sejarah panjang yang melibatkan masa kolonialisme Prancis, perjuangan

kemerdekaan, serta perselisihan perbatasan yang berkepanjangan. Pasca Aljazair memperoleh kemerdekaan tahun 1962, kedua negara baik Maroko maupun Aljazair memiliki pandangan politik dan kebijakan luar negeri yang berbeda, terutama dalam hal memperebutkan wilayah regional pasca lepasnya Prancis yang menjadi kontroversi (Willis, 2014).

Perseteruan diplomatik antara Maroko dan Aljazair memiliki akar sejarah yang panjang, Trauma historis dan dendam yang belum terselesaikan di kalangan elit politik dan militer Aljazair terhadap Maroko, terutama setelah kegagalan Maroko merebut Bechar dan Tindouf dalam Perang Pasir 1963 (Farsoun & Paul, 1976). Pada awalnya, Maroko memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Aljazair atas Prancis, yang pada awalnya berlandaskan solidaritas Muslim, justru dihapus dari narasi resmi Aljazair yang ingin membangun identitas nasional tanpa bayang-bayang masa lalu.

Ketegangan antara Maroko dan Aljazair telah berlangsung selama beberapa dekade, dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan keamanan. Salah satu sumber utama ketegangan adalah konflik mengenai Sahara Barat, wilayah yang diklaim oleh Maroko tetapi didukung oleh Aljazair untuk kemerdekaannya melalui kelompok Polisario. Perbedaan sikap ini telah memperburuk hubungan kedua negara, yang sering kali berujung pada konflik diplomatik dan militer, termasuk penutupan perbatasan darat sejak tahun 1994 (DW, 2021).

Persaingan geopolitik juga semakin memanas seiring dengan dukungan Aljazair terhadap Front Polisario yang mengusung isu kemerdekaan Sahara Barat, sebuah langkah strategis untuk menghambat dominasi Maroko di kawasan. Ketidaksenangan Aljazair terhadap pengaruh Maroko di Afrika dan keputusan diplomatik global yang semakin menguntungkan Rabat turut memperburuk hubungan kedua negara. Dari keputusan Amerika Serikat untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat hingga dukungan Spanyol terhadap rencana otonomi Maroko, Aljazair mengalami kemunduran diplomatik yang signifikan. Upaya Aljazair untuk menahan pengaruh Maroko melalui inisiatif seperti proyek pipa gas trans-Sahara dan pembentukan zona perdagangan bebas regional menjadi indikasi ketidakpuasan mereka. Ketidakstabilan hubungan ini pada akhirnya memuncak dalam pemutusan hubungan diplomatik pada tahun 2021, yang mencerminkan ketidakmampuan kedua negara untuk mencapai titik temu dalam persaingan mereka di Afrika Utara. (Bennis, 2024)

Pada tahun 2021, Aljazair secara resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Maroko. Keputusan ini dipicu oleh serangkaian insiden dan peristiwa yang semakin meningkatkan ketegangan bilateral. Beberapa sebab menjadi pemicu termasuk pernyataan diplomatik yang dianggap provokatif, tuduhan keterlibatan Maroko dalam kebakaran hutan di wilayah Kabylie Aljazair, serta meningkatnya ketegangan di Sahara Barat. Aljazair juga menuduh Maroko memiliki keterlibatan dalam aktivitas yang mengancam keamanan nasionalnya (Bimo, 2021). Keputusan tersebut merefleksikan eskalasi konflik strategis yang berakar pada persaingan geopolitik dengan dampak terhadap stabilitas kawasan.

Pemutusan hubungan diplomatik ini menandai eskalasi konflik yang lebih serius antara kedua negara dan berdampak pada dinamika politik regional Afrika Utara. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan bilateral Maroko-Aljazair, tetapi juga memiliki implikasi lebih luas terhadap stabilitas regional, kerja

sama ekonomi, serta peran aktor internasional dalam menangani konflik di kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai penyebab dan faktor pemicu pemutusan hubungan diplomatik ini untuk memahami dampaknya serta kemungkinan jalan keluar bagi kedua negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik Maroko-Aljazair pada tahun 2021. Dengan menggunakan pendekatan historis dan geopolitik, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana dinamika hubungan kedua negara berkembang, serta faktor-faktor yang memicu eskalasi ketegangan hingga mencapai titik pemutusan diplomatik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami dinamika diplomasi di kawasan Afrika Utara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial berdasarkan data non-numerik. Data kualitatif yang dihasilkan lebih bersifat deskriptif dan interpretatif, di mana peneliti berupaya mengungkapkan fenomena yang diteliti dengan mendalam dan menyeluruh sesuai dengan perspektif yang diamati (Sugiyono, 2013). Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik antara Maroko dan Aljazair pada tahun 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai dokumen resmi, laporan, artikel jurnal akademik, serta analisis terhadap media berita. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai faktor historis, geopolitik, dan kebijakan luar negeri kedua negara.

## **PEMBAHASAN**

### **Awal Konflik Hubungan Aljazair dan Maroko**

Hubungan antara Aljazair dan Maroko mulai diwarnai oleh ketegangan politik dan diplomatik sejak kedua negara memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Eropa pada pertengahan abad ke-20. Meskipun secara geografis bertetangga dan memiliki sejumlah kemiripan historis, budaya, dan agama, namun relasi bilateral keduanya kerap diliputi oleh konflik kepentingan, perebutan pengaruh, serta kecurigaan strategis (Rachidi, 2022). Persaingan antar negara-bangsa dalam mempertahankan dan memperluas kepentingan nasional yang kerap mengesampingkan nilai-nilai idealisme demi menjaga kedaulatan dan keamanan.

Sebelum hubungan antara Maroko dan Aljazair memburuk, kedua negara memiliki hubungan baik. Maroko sempat menjadi salah satu pendukung utama perjuangan kemerdekaan Aljazair dari kolonialisme Prancis. Dukungan terlihat melalui pemberian perlindungan kepada para pemimpin Front de Libération Nationale (FLN) serta fasilitas logistik selama perjuangan bersenjata melawan Prancis. Sultan Mohammed V dengan terbuka menunjukkan solidaritasnya terhadap perjuangan bangsa Aljazair dan mengedepankan semangat pan-Arab dan anti-kolonialisme (MEE, 2021).



Permusuhan awal antara Aljazair dan Maroko dapat ditelusuri ke tahun 1963, melalui konflik bersenjata yang dikenal sebagai perang pasir. Perang ini muncul akibat krisis wilayah perbatasan yang belum sepenuhnya disepakati setelah kedua negara merdeka dari Prancis. Maroko mengklaim wilayah di perbatasan selatan Aljazair sebagai bagian dari wilayah historisnya berdasarkan konsep *Greater Morocco* yang direncanakan pemimpin nasionalis Allal al-Fassi meliputi wilayah Sahara Barat, Mauritania, bagian Barat Laut Mali, Barat Daya Aljazair.

Sumber: Faustina Morales and the author.

DOI: [10.1080/13629387.2013.767041](https://doi.org/10.1080/13629387.2013.767041)

Gambar peta di atas memperlihatkan lokasi-lokasi utama yang menjadi medan konflik dalam Perang Pasir. Konflik ini dipicu oleh klaim teritorial Maroko atas wilayah Tindouf dan Bechar yang sebelumnya berada di bawah kontrol kolonial Prancis, dan dianggap bagian dari konsep *Greater Morocco*. Titik nomor 1 dalam peta menandai pos perbatasan Hassi Beida dan Tindjoub yang berada di wilayah Tindouf, Aljazair, yang menjadi lokasi awal pecahnya pertempuran. Pasukan Aljazair menduduki pos tersebut pada 8 Oktober 1963, sebagai respons atas klaim dan manuver militer Maroko sebelumnya. Ketegangan meningkat ketika konflik meluas ke arah utara, sebagaimana ditunjukkan oleh titik nomor 2, yakni serangan pasukan Aljazair ke kota Ich di wilayah Maroko pada 18 Oktober 1963 (Torres & Garcia, 2013).

### **Konflik Wilayah Sahara Barat**

Isu paling dominan dan terus menjadi sumber ketegangan sampai saat ini adalah konflik mengenai Sahara Barat. Pasca Spanyol menarik diri dari wilayah Sahara Barat pada 1975, Maroko mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari teritorinya. Klaim sejarah berdasarkan Kerajaan Maroko yang memiliki wilayah besar sebelum mengalami masa penjajahan dan perpecahan mencakup wilayah negara Maroko saat ini hingga wilayah Sahara Barat. Penduduk asli Sahara Barat (Polisario) menganggap klaim tersebut adalah upaya penjajahan, karena mereka telah menjadi negara merdeka pasca lepas dari penjajahan Spanyol tahun 1975. Aljazair turut menolak klaim tersebut dan mendukung kelompok Polisario, sebuah gerakan kemerdekaan yang menuntut pembentukan negara merdeka bernama Republik Arab Sahrawi Demokratik (RASD). Dukungan terbuka Aljazair terhadap

gerakan separatis ini dipandang Maroko sebagai intervensi terhadap urusan dalam negerinya serta ancaman terhadap integritas teritorialnya (Ariyati, 2019).

Langkah Aljazair dilihat sebagai bentuk *power projection* dalam rangka membendung dominasi regional Maroko, sekaligus memperkuat posisinya sebagai aktor utama di kawasan Maghreb. Sebaliknya, bagi Maroko, dukungan Aljazair terhadap Polisario merupakan bentuk ancaman nyata yang harus dihadapi demi menjamin *sovereignty* dan *national interest*.

Dalam dua dekade terakhir, persaingan antara Aljazair dan Maroko semakin tajam dalam geopolitik, termasuk dalam perebutan pengaruh di wilayah Kawasan. Jika ditinjau dari latar belakang sejarahnya, Maroko merupakan salah satu negara yang berperan dalam pembentukan Uni Afrika (UA) pada tahun 1963. Akan tetapi, keanggotaan Maroko dalam organisasi tersebut tidak berlangsung permanen. Pada tahun 1984, Maroko memilih untuk menarik diri dari UA. Keputusan tersebut diambil sebagai bentuk protes atas diterimanya Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) sebagai anggota resmi UA pada saat itu. Kebijakan mengejutkan ketika Maroko berhasil meminta kembali bergabung dengan Uni Afrika pada tahun 2017 setelah sebelumnya keluar. Langkah tersebut dinilai sebagai strategi Maroko untuk kembali mengamankan dan mengambil dukungan regional maupun internasional atas klaimnya terhadap Sahara Barat (Putra, 2018).

Upaya Maroko tampaknya cukup berhasil dalam meningkatkan dukungan internasional terhadap klaimnya atas Sahara Barat melalui diplomasi aktif. Lebih dari 100 negara, termasuk 30 negara Afrika, kini menyatakan dukungannya terhadap inisiatif otonomi Maroko sebagai solusi damai dan kredibel atas konflik Sahara Barat. Inisiatif ini dinilai sebagai satu-satunya jalan realistis untuk menyelesaikan sengketa wilayah tersebut di bawah kedaulatan Maroko, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB (OZ Arab Media, 2024). Dukungan internasional tersebut menjadi pesan kuat bagi Aljazair, yang selama ini dituduh sebagai aktor utama di balik berlarut-larutnya konflik dengan mendukung kelompok separatis Polisario.

Maroko mengusulkan sebuah solusi politik berupa inisiatif otonomi untuk Sahara Barat yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Inisiatif yang disolusikan, memberikan otonomi luas kepada penduduk Sahara Barat dalam mengatur urusan domestik mereka seperti pemerintahan lokal, pendidikan, dan ekonomi namun tetap berada di bawah kedaulatan Maroko dalam urusan pertahanan, keamanan nasional, mata uang, dan hubungan luar negeri (Holleis, 2022). Pendekatan ini dianggap lebih pragmatis dan realistis oleh banyak negara dibandingkan tuntutan kemerdekaan penuh dari Front Polisario.

Sementara itu, Aljazair terus berupaya mempertahankan posisinya sebagai kekuatan regional dengan mengandalkan sumber daya energinya, terutama gas alam, untuk membangun kemitraan strategis dengan negara-negara Eropa dan kawasan Sahel (Escribano, 2025). Namun, pendekatan ini menghadapi tantangan ketika Spanyol, yang sebelumnya netral, secara resmi memberikan dukungan terhadap rencana otonomi Maroko atas Sahara Barat pada Maret 2022 (Zouiten, 2025). Kebijakan tersebut memicu ketegangan diplomatik antara Aljazair dan Spanyol. Aljazair menarik duta besarnya di Madrid sebagai protes ketika Spanyol mendukung rencana Maroko untuk memberikan lebih banyak otonomi ke wilayah yang disengketakan dan mengancam akan mengentikan ekspor gas-nya dengan

Spainol, meskipun sebelumnya menjamin pasokan energi yang stabil (Euro News, 2022).

Rivalitas kedua negara tersebut menunjukkan bagaimana kedua negara beroperasi dalam logika *zero-sum game*, di mana keuntungan satu pihak dianggap sebagai kerugian pihak lain. Ketegangan yang terus menerus membentuk semacam *cold war* antara Aljazair dan Maroko, yang ditandai oleh hubungan diplomatik yang rapuh, absennya kerja sama ekonomi, serta saling tuding dalam isu-isu keamanan regional. Negara-negara kemudian memilih untuk memperkuat diri sendiri (*self-help*) dan aktif mencegah peningkatan kekuatan negara tetangga yang dianggap berpotensi mengancam.

### **Aljazair Memutus Hubungan Diplomatik dengan Maroko**

Pada 24 Agustus 2021, Aljazair secara resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko yang menandai puncak dari ketegangan yang telah berlangsung selama beberapa dekade antara kedua negara. Keputusan pemutusan hubungan diplomatik ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Aljazair, Ramtane Lamamra, mengatakan bahwa “Maroko terus menerus melakukan tindakan permusuhan terhadap Aljazair” (Saju, 2021). Beberapa faktor tindakan yang menjadi pendorong dalam memicu keputusan Aljazair untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko meliputi:

*Pertama*, dugaan keterlibatan Maroko dalam mendukung gerakan separatis di wilayah Kabylie, Aljazair, suatu gerakan untuk Penentuan Nasib Sendiri Kabylie atau *Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie* (MAK). MAK merupakan kelompok yang berakar dari etnis Berber di wilayah Kabylie, yang awalnya memperjuangkan otonomi kultural dan politik, namun kemudian berkembang menjadi gerakan separatis yang secara terbuka menyuarakan kemerdekaan dari Aljazair. Pemerintah Aljazair secara tegas menolak gerakan ini dan pada tahun 2021 menetapkan MAK sebagai organisasi teroris, menyusul dugaan keterlibatan mereka dalam rencana-rencana kriminal termasuk aksi pembakaran hutan dan percobaan pengeboman (Houda & Merezak, 2021).

Puncak ketegangan terjadi ketika Duta Besar Maroko untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Omar Hilale, menyampaikan pernyataan yang secara eksplisit mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Kabylie dalam forum internasional pada Juli 2021. Pernyataan ini dipandang oleh Aljazair sebagai bentuk provokasi dan campur tangan langsung terhadap urusan dalam negeri negara mereka (International Crisis Group, 2024). Aljazair menilai sikap tersebut tidak dapat dilepaskan dari strategi Maroko untuk menekan Aljazair secara diplomatik, terutama dalam sengketa terkait isu Sahara Barat, di mana Aljazair mendukung kemerdekaan Republik Demokratik Arab Sahrawi (SADR) yang ditentang keras oleh Maroko.

Lebih dari pernyataan diplomatik, Aljazair menuduh adanya dukungan finansial dari Maroko terhadap MAK. Salah satu tuduhan yang mengemuka berasal dari pengakuan Idir Djouder, mantan anggota MAK, yang menyatakan bahwa pemerintah Maroko memberikan dana sebesar 250.000 per bulan kepada MAK pada tahun 2011. Meskipun klaim ini telah dibantah oleh pihak MAK, hal ini telah memperkuat narasi yang dibangun oleh pemerintah Aljazair bahwa Maroko menggunakan gerakan separatis untuk melemahkan stabilitas dalam negeri Aljazair (DjaZaïress, 2011).

*Kedua*, tuduhan penggunaan perangkat lunak mata-mata bernama Pegasus oleh Maroko untuk menyadap para pejabat tinggi Aljazair. Pegasus, yang dikembangkan oleh perusahaan Israel NSO Group, merupakan spyware canggih yang mampu menginfeksi perangkat telepon pintar tanpa interaksi dari pengguna dengan cara mengaktifkan kamera dan mikrofon tanpa sepengetahuan pengguna. Setelah berhasil menyusup, spyware ini dapat mengakses isi perangkat, termasuk pesan teks, email, percakapan panggilan, lokasi GPS, hingga kamera dan mikrofon. Pada 2021 dilaporkan bahwa otoritas Maroko menargetkan lebih dari 6.000 telepon Aljazair, termasuk milik politisi dan pejabat tinggi militer. Aksi ini berkontribusi pada keputusan Aljazair untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko (MEMO, 2025). Dalam dunia internasional, penggunaan alat semacam ini terhadap pejabat negara lain dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan dan etika diplomasi, terlebih jika menysasar pemimpin atau institusi negara.

Isu ini mencuat pada pertengahan Juli 2021, setelah sebuah investigasi kolaboratif internasional yang dipimpin oleh organisasi nirlaba Forbidden Stories dan Amnesty International mengungkapkan adanya ribuan nomor telepon yang menjadi target potensial Pegasus oleh sejumlah pemerintah di seluruh dunia. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Maroko merupakan salah satu negara pengguna Pegasus yang diduga menysasar target-target di luar negeri, termasuk di dalam pemerintahan Aljazair. Nomor-nomor telepon milik pejabat tinggi Aljazair, termasuk Presiden Abdelmadjid Tebboune, serta beberapa anggota militer, intelijen, dan tokoh-tokoh diplomatik, dilaporkan berada dalam daftar target penyadapan (Cheref, 2021).

Meskipun pemerintah Maroko dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan mengajukan gugatan terhadap organisasi media Prancis yang menyebarkan laporan itu, Aljazair menanggapi secara serius. Pemerintah Aljazair menganggap hal ini sebagai bentuk agresi digital yang sangat mengancam keamanan nasional dan stabilitas internal negara. Menteri Luar Negeri Aljazair kala itu, Ramtane Lamamra, menyebut bahwa tuduhan penyadapan ini telah melukai prinsip saling percaya antarnegara tetangga dan juga mencerminkan strategi jangka panjang Maroko untuk mencampuri urusan dalam negeri Aljazair.

Aljazair mengambil tindakan tegas dengan membentuk tim investigasi internal untuk menyelidiki dampak Pegasus terhadap struktur keamanan negara. Meskipun hasil penyelidikan tidak dipublikasikan secara luas, tindakan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Aljazair memandang ancaman tersebut. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan saat pemutusan hubungan diplomatik pada 24 Agustus 2021, Aljazair secara eksplisit mencantumkan “aksi permusuhan yang terus menerus dari pihak Maroko” sebagai salah satu alasan utama, yang secara implisit mengacu pada praktik-praktik seperti penggunaan Pegasus (Wires, 2021).

*Ketiga*, keputusan Maroko untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan yang diumumkan secara resmi pada Desember 2020 sebagai bagian dari kesepakatan dengan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang dikenal sebagai *Abraham Accords* sebuah inisiatif untuk menjalin hubungan diplomatik antara Israel dengan negara-negara Arab. Dalam kesepakatan tersebut, Maroko mendapatkan pengakuan dari Amerika Serikat atas klaimnya atas wilayah Sahara Barat, yang selama ini menjadi sengketa

dengan Front Polisario yang didukung Aljazair (Robbins, 2021). Bagi Maroko, ini merupakan kemenangan diplomatik strategis. Sebaliknya, bagi Aljazair, normalisasi hubungan dengan Israel, terutama dengan adanya imbalan geopolitik, dipandang sebagai tindakan yang sangat provokatif dan mengkhianati solidaritas tradisional Arab terhadap perjuangan Palestina.

Aljazair selama ini dikenal sebagai salah satu negara Arab yang paling vokal dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi hubungan dengan Israel. Dalam sejarahnya, Aljazair tidak pernah membuka hubungan resmi dengan Tel Aviv sebelum Palestina merdeka dan secara konsisten menempatkan isu Palestina sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya (MEMO, 2025). Sebagai bentuk solidaritas, parlemen Aljazair mengajukan rancangan undang-undang yang bertujuan melarang seluruh transaksi ekonomi antara perusahaan Aljazair dan perusahaan asing yang memiliki keterkaitan dengan Israel. Inisiatif ini dipimpin oleh Abdel-Salam Bachagha dari Partai Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian (MSP) dan mencerminkan dukungan publik yang kuat terhadap kriminalisasi normalisasi hubungan dengan Israel. Meski tidak ada perusahaan Israel yang beroperasi langsung di Aljazair, undang-undang yang diusulkan bertujuan menutup celah hukum yang menjadi potensi masuknya produk atau kemitraan Israel ke pasar Aljazair. Rancangan tersebut menargetkan perusahaan asing seperti Carrefour dan AXA, yang telah diidentifikasi oleh gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) karena memiliki hubungan dengan bisnis Israel (Atti, 2024).

Oleh karena itu, ketika Maroko mengumumkan normalisasi hubungan, termasuk membuka kantor penghubung diplomatik, menjalin kerja sama ekonomi, serta menerima kunjungan tingkat tinggi dari pejabat Israel, Aljazair menganggapnya sebagai ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar solidaritas regional dan sekaligus sebagai bentuk kolaborasi dengan kekuatan yang mereka anggap sebagai penjajah.

Reaksi Aljazair terhadap langkah Maroko tidak cukup terbatas pada kritik verbal. Pemerintah Aljazair memperingatkan bahwa kehadiran Israel di perbatasan baratnya, melalui kerja sama militer dan intelijen dengan Maroko, dapat mengganggu stabilitas kawasan. Kekhawatiran ini diperkuat dengan kunjungan Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, ke Rabat pada November 2021, di mana kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama militer dan keamanan. Israel menawarkan produk-produk pertahanan canggih mulai dari pesawat serang tanpa awak hingga sistem pertahanan rudal *Iron Dome* (Aljazeera, 2021). Aljazair merasa Langkah tersebut merupakan peningkatan ancaman keamanan secara langsung, mengingat perbatasan Maroko–Aljazair merupakan wilayah sensitif yang telah lama dijaga dengan ketat oleh kedua belah pihak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pemutusan hubungan diplomatik antara Aljazair dan Maroko pada tahun 2021 merupakan puncak dari konflik historis dan ketegangan geopolitik yang telah berlangsung lama. Ketidaksepakatan mengenai wilayah Sahara Barat menjadi faktor utama yang terus memperkeruh hubungan bilateral kedua negara. Aljazair yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Sahara Barat melalui Front Polisario berseberangan dengan klaim teritorial Maroko

atas wilayah tersebut, menciptakan dinamika regional yang sensitif dan rentan konflik. Konflik semakin memanas akibat berbagai insiden diplomatik, tuduhan spionase, serta pernyataan politik yang dianggap provokatif oleh kedua belah pihak. Puncaknya terjadi ketika Aljazair dengan resmi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Maroko pada Agustus 2021, dengan alasan bahwa tindakan Maroko telah merugikan stabilitas dan kedaulatan Aljazair. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konflik antara Maroko dan Aljazair, lebih dari persoalan bilateral, tetapi juga bagian dari perebutan pengaruh politik dan keamanan di kawasan Afrika Utara. Oleh karena itu, penyelesaian jangka panjang memerlukan keterlibatan regional dan internasional serta pendekatan diplomatik yang lebih inklusif untuk mencegah eskalasi yang lebih besar di masa depan.

## REFERENSI

- Aljazeera. (2021, November 23). *Israel to formalise defence ties with Morocco on minister's visit*. Diambil kembali dari AlJazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/23/israel-to-formalise-defence-ties-with-morocco-on-ministers-visit>
- Ariyati, S. K. (2019). ANALISA KONFLIK WILAYAH SAHARA BARAT DAN UPAYA RESOLUSI KONFLIK. *Verity - UPH Journal of International Relations Faculty of Social and Political Science Pelita Harapan University*, 30-31.
- Atti, B. E. (2024, November 12). *Algerian lawmakers introduce draft law to ban foreign firms with links to Israel*. Diambil kembali dari New Arab: <https://www.newarab.com/news/algeria-may-pass-law-ban-foreign-firms-links-israel>
- Bennis, S. (2024, June 6). *Algeria's Morocco obsession has killed reconciliation prospects*. Diambil kembali dari Atlantic Council: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/algeria-morocco-reconciliation-western-sahara-sahrawi-polisario-front/>
- Bimo, E. S. (2021, Agustus 25). *Aljazair Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Maroko, Kawasan Maghribi Afrika Runyam*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.tv/internasional/204919/aljazair-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-maroko-kawasan-maghribi-afrika-runyam?page=all>
- Cheref, A. K. (2021, July 29). *Is Morocco's cyber espionage the last straw for Algeria?* Diambil kembali dari The New Arab: <https://www.newarab.com/analysis/moroccos-cyber-espionage-last-straw-algeria>
- Cornago, N. (2008). *Diplomacy. Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict*, 580.
- DjaZairess. (2011, October 6). *Soutien financier secret du Maroc à Ferhat mehenni*. Diambil kembali dari DjaZairess: <https://www.djazairess.com/fr/ennaharfr/8416>
- DW. (2021, September 23). *Algeria bans Morocco from its airspace*. Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/algeria-bans-morocco-from-its-airspace-amid-growing-tensions/a-59268563>

- Escribano, G. (2025, March 17). *Another round of Algerian gas for Europe*. Diambil kembali dari Real Instituto Elcano: <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/another-round-of-algerian-gas-for-europe/>
- Euro News. (2022, April 28). *Spain seeks to calm Algeria after threat to cut natural gas supplies*. Diambil kembali dari Euro News: <https://www.euronews.com/2022/04/28/spain-seeks-to-calm-algeria-after-threat-to-cut-natural-gas-supplies>
- Farsoun, K., & Paul, J. (1976). War in the Sahara: 1963 . *MERIP*, 13.
- Holleis, J. (2022, August 6). *Algeria suspends 20-year-old treaty with Spain*. Diambil kembali dari DW: <https://www.dw.com/en/morocco-years-long-strategy-to-claim-the-western-sahara-increasingly-pays-off/a-70021096>
- Houda, & Merezak. (2021, August 30). *The Movement for the Self-Determination of Kabylia (MAK)*. Diambil kembali dari Morocco World News: <https://www.moroccoworldnews.com/2021/08/55640/the-movement-for-the-self-determination-of-kabylia-mak/>
- International Crisis Group. (2024, November 29). *Managing Tensions between Algeria and Morocco*. Diambil kembali dari International Crisis Group: <https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/north-africa/247-algeria-morocco-western-sahara/managing-tensions-between>
- MEE. (2021, August 26). *Algeria and Morocco: A troubled history*. Diambil kembali dari Middle East Eye: <https://www.middleeasteye.net/news/algeria-morocco-relationship-tense-history>
- MEMO. (2025, February 4). *Algeria president confirms 'no normalisation' with Israel before Palestinian statehood*. Diambil kembali dari Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20250204-algeria-president-confirms-no-normalisation-with-israel-before-palestinian-statehood/>
- MEMO. (2025, March 13). *Sahrawi activist condemns Morocco's use of Pegasus spyware in Western Sahara*. Diambil kembali dari Middle East Monitor: <https://www.middleeastmonitor.com/20250313-sahrawi-activist-condemns-moroccos-use-of-pegasus-spyware-in-western-sahara/>
- OZ Arab Media. (2024, June 22). *Moroccan Sahara : 100 countries including 30 Africans support the autonomy initiative, this international membership that Algeria pretends to ignore*. Diambil kembali dari OZ Arab Media: <https://ozarab.media/moroccan-sahara-100-countries-including-30-africans-support-the-autonomy-initiative-this-international-membership-that-algeria-pretends-to-ignore/>
- Putra, R. A. (2018). Alasan Maroko Bergabung Dengan Uni Afrika Tahun 2017. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 58-60.
- Rachidi, I. (2022, May 3). *Morocco and Algeria: A Long Rivalry*. Diambil kembali dari Sada: <https://carnegieendowment.org/sada/2022/05/morocco-and-algeria-a-long-rivalry?lang=en>
- Robbins, M. (2021). Arab Public Feelings about Normalization of Arab Countries with Israel. Barcelona: European Institute of the Mediterranean.
- Saju, P. S. (2021, August 25). *Aljazair Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Maroko*. Diambil kembali dari Kompas:

- <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/08/25/aljazair-putuskan-hubungan-diplomatik-dengan-maroko>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torres, A., & Garcia. (2013). US diplomacy and the North African ‘War of the Sands’ (1963). *The Journal of North African Studies*, 328-329. doi:10.1080/13629387.2013.767041
- Willis, M. (2014). *Politics and Power in the Maghreb: Algeria, Tunisia and Morocco from Independence to the Arab Spring*. New York: Oxford University Press.
- Wires, N. (2021, August 24). *Algeria severs diplomatic ties with Morocco, citing ‘hostile actions’*. Diambil kembali dari France24: <https://www.france24.com/en/live-news/20210824-algeria-severs-diplomatic-ties-with-morocco-citing-hostile-actions>
- Zouiten, S. (2025, March 27). *Algeria Pressures Spain to Change Its Stance on Western Sahara*. Diambil kembali dari Morocco World News: <https://www.moroccoworldnews.com/2025/03/188364/algeria-pressures-spain-to-change-its-stance-on-western-sahara/>